

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Ilmu Pertahanan Negara

Ilmu pertahanan adalah bidang ilmu yang mengkaji segala komponen yang bersinergi untuk memanfaatkan keadaan aman di tingkat nasional yang relevan dengan sasaran penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan. Kebutuhan untuk mempertimbangkan secara filosofis persoalan pertahanan muncul dari keberadaan entitas yang diklaim oleh negara (*state*) dan kebutuhan untuk mempertahankan (*survive*) terhadap ancaman (*threat*) terhadap negara. Pokok bahasan ilmu pertahanan adalah perilaku bangsa-bangsa dalam menghadapi ancaman. Potensi ancaman nonmiliter memiliki lingkup kajian yang sangat luas yang disebut sebagai *transnasional crimes*, salah satunya ancaman di wilayah kedaulatan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyeberangan perbatasan ilegal, terorisme, pencurian ikan dan invasi asing. ideologi. Isu-isu tersebut harus disikapi dengan tindakan non-militer yang tepat dan beralasan melalui pembangunan kawasan perbatasan yang sinergis dan terintegrasi oleh TNI dan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.

Ilmu pertahanan bersifat universal, karena menjadi kebutuhan tidak hanya untuk militer tetapi juga untuk warga sipil, dan ancaman merasuki setiap dimensi kehidupan warga negara dan bangsa, mengancam kedaulatan nasional. pertahanan dan pertahanan negara. Wacana pertahanan dijelaskan untuk sistem pertahanan negara (Sishaneg) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan (2) wacana Pertahanan Negara menjelaskan :

- 1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- 2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Ilmu pertahanan meliputi pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer dan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman non militer. Merujuk pada judul pembangunan kawasan perbatasan di atas, hal ini erat kaitannya dengan misi operasi militer selain perang (OMSP) yang salah satu misinya menangani masalah perbatasan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk rencana program perbatasan. Pembangunan daerah yang dilakukan oleh non-TNI/instansi pemerintah akan mengutamakan penanggulangan ancaman non militer melalui penerapan sistem pengawasan perbatasan yang baik. Artinya, pembangunan berlangsung melalui pendekatan paralel terhadap kesejahteraan dan keamanan. Selain itu, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan sarana/prasarana pelayanan publik, dan kurangnya sumber daya manusia dapat menimbulkan ancaman non militer di wilayah perbatasan dan merusak pertahanan wilayah perbatasan. Negara.

Mengacu pada UU No.23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada bagian penjelasan, dinyatakan bahwa Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negeranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan

Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman. Pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan.

Sehingga, keterkaitan teori ilmu pertahanan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bahwa Pengelolaan Sumber Daya Alam Blue Economy menjadi peluang dan tantangan Geopolitik dan Geostrategi *Forecasting/* Peramalan *Blue Economy* Dalam Meningkatkan *Gross National Income* dan Memperkuat Pertahanan Negara Mewujudkan Poros Maritim Dunia yang lebih kokoh.

2.1.2 Blue Economy

a) Mazhab Gunter Pauli

Konsep Ekonomi Biru pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Günther Pauli dalam bukunya *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*, dan menggali potensi alam untuk perlindungan dan konservasi lingkungan di komunitas global, mencari keuntungan, Sumber Daya Alam dan Industri, Inisiatif Pengurangan Biaya, Transisi Energi Hijau yang mencakup produk konsumsi, bersih, daur ulang, atau terbarukan. Dalam bukunya, Ekonomi Biru adalah kumpulan inovasi yang membantu menciptakan kesadaran global yang berakar pada pencarian solusi praktis berdasarkan sistem alam berkelanjutan. (G. Pauli, 2010).

Konsep *Blue Economy* muncul dari tuntutan untuk mengatasi kegagalan ekonomi hijau (Brundtland et al., 1987) untuk menangkap

pentingnya Sumber Daya Alam laut bagi negara dan ekonomi (Gruby et al., 2016; Maclellan, 2015; G. A. Pauli, 2010; Silver et al., 2015; Whisnant & Reyes, 2015). Kedua konsep tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa model ekonomi tradisional produksi dan konsumsi manusia belum secara memadai memasukkan berbagai sumber daya dan nilai-nilai yang berkontribusi pada ekonomi yang berkembang dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Brundtland et al., 1987). *Blue Economy* adalah sebuah konsep yang mencakup proses industri atau kegiatan ekonomi yang dalam skala yang lebih besar, dibuat lebih efisien dengan (1) menghasilkan lebih sedikit limbah ke lingkungan dan (2) meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan agar tidak eksploitatif, (3) bernilai tambah tinggi dengan mengolah limbah menjadi bahan baku. Daya tarik *Blue Economy* mulai berkembang, sebagaimana dibuktikan melalui serapan Kelembagaan Bank Dunia, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Voyer et al., 2018).

Sejak abad ke-21, konsep "*Blue Economy*" menjadi semakin populer. Masyarakat internasional percaya bahwa *Blue Economy* mencakup tiga bentuk ekonomi: ekonomi yang menghadapi krisis air global (McGlade et al., 2012) ; ekonomi pembangunan yang inovatif (G. A. Pauli, 2010) dan pengembangan ekonomi kelautan (Behnam, 2012). Di bidang penelitian akademik, literatur penelitian tentang *Blue Economy* terutama mencakup aspek-aspek berikut. (Kathijotes, 2013) mengemukakan tujuan model *Blue Economy* adalah untuk mengubah sumber daya dari kelangkaan ke kelimpahan, dan untuk mulai menangani masalah yang menyebabkan masalah lingkungan. (Mulazzani et al., 2016) mengedepankan perangkat pengelolaan berbasis kerangka jasa ekosistem untuk mengatasi pertumbuhan biru pesisir. (Soma et al., 2018) mengusulkan untuk mencapai pertumbuhan biru berkelanjutan jangka panjang melalui kolaborasi, inklusi, dan kepercayaan di sektor kelautan. (den Burg et al., 2019) berfokus pada meringkas kemungkinan

batas pertumbuhan industri kelautan dari dimensi spasial pertumbuhan biru.

Sebagian besar penelitian manajemen *Blue Economy* didasarkan pada perspektif pembangunan berkelanjutan. (Keen et al., 2018) merancang kerangka konseptual untuk *Blue Economy* yang dapat digunakan untuk menilai pengelolaan laut yang berkelanjutan. (Sarker et al., 2018) juga mengembangkan kerangka manajemen *Blue Economy* yang menekankan bahwa diperlukan upaya bersama untuk mendorong *Blue Economy* dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (Howard, 2018) melakukan diskusi mendalam tentang peran pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Konvergensi *Blue Economy* dan ekosistem laut, akuntansi ekosistem terkait erat dengan pertumbuhan biru (Häyhä & Franzese, 2014; Lillebø et al., 2017).

Konsep *Blue Economy* dapat ditelusuri kembali ke pembangunan berkelanjutan, dengan meningkatnya komunikasi internasional dan studi mendalam tentang konsep *Blue Economy*. Penelitian interdisipliner dan multidisiplin sangat penting ketika mempelajari kasus-kasus *Blue Economy*, terutama salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh disiplin ilmu yang terlibat.

Konsep *sustainable development* disusun untuk menjawab tantangan krisis ekonomi, seperti pangan, air, dan energy yang diharapkan tidak merusak lingkungan, seperti; atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup. Tidak kalah penting bahwa sasaran lain yang ingin dicapai yaitu dengan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang mengedepankan prinsip-prinsip berkeadilan. *Blue economy* menjadi wujud solusi baru dari *green economy* yang dikenal dengan istilah "*Blue Sky Blue Ocean*". Istilah tersebut diartikan bahwa ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru.

Prinsip-prinsip ekonomi biru yang berpedoman pada alam (ekosistem), berfungsi secara efisien yang berkesesuaian dengan ketersediaan sumber daya alam, dan memperkaya tanpa mengurangi

ketersediaan alam (transisi dari kelangkaan ke kelimpahan). Kedua, *zero waste*, produk limbah yang dijadikan sebagai sumber makanan/energi bagi yang lain, sehingga keadaan ekosistem berjalan secara seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa mengekstraksi energi dari luar, dan lebih banyak energi tersedia untuk mengekstrak nutrisi secara efisien. Hemat energi untuk menggunakan keterampilan semua kontributor dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip *Blue Economy*, Kebijakan Pengelolaan kelautan dan perikanan akan mendorong pembangunan roda perekonomian dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, yang diartikan sebagai peningkatan jumlah dan ragam produk bernilai tambah untuk kepentingan masyarakat, serta melindungi lingkungan dari polusi dan kontaminasi. *Blue Economy* didefinisikan sebagai model pembangunan ekonomi yang mengombinasikan pembangunan laut dan darat, dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi, industri, darat dan air laut untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut secara menyeluruh.

Dalam buku (G. A. Pauli, 2010) yang berjudul *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*, esensi dari *blue Economy* adalah :

- 1) *Learning From Nature* : Konsep ekonomi biru meniru alam. Bekerja sesuai dengan perintah alam. Memperkaya alam daripada menguranginya (berubah dari kelangkaan menjadi kelimpahan).
- 2) *The Logic of Ecosystems*; Fungsi ekosistem digunakan sebagai model ekonomi biru. Ia dapat mengalir seperti air dari pegunungan, membawa nutrisi dan energi, serta memenuhi kebutuhan dasar kehidupan semua komponen ekosistem. Ini menjadi bahan baku/sumber energi lain. Energi didistribusikan secara merata dan tidak ada ekstraksi energi dari luar hanya oleh gravitasi.
- 3) *Inspired by 100 Innovations* : Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami Ekonomi biru dengan prinsip yang meniru cara kerja

ekosistem: menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam menghilangkan nutrisi dan limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pemangku kepentingan..

Dari esensi tersebut maka kemudian dijabarkan prinsip-prinsip dari *blue Economy*, yaitu:

- 1) *Nature's efficiency* : *Blue Economy* berpedoman pada ekosistem alam, yang artinya melakukan kegiatan perekonomian secara efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam dan tidak mengurangi namun memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*).
- 2) *Zero Waste* : zero waste, produk limbah dijadikan sebagai sumber makanan/energi bagi yang lain, sehingga keadaan ekosistem berjalan secara seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa mengekstraksi energi dari luar, dan lebih banyak energi tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
- 3) *Social Inclusiveness* kemandirian dan kesetaraan social akan lebih menghasilkan banyak pekerjaan, lebih banyak kesempatan bagi orang yang berada di garis kemiskinan.
- 4) *Cyclic Systems of Production* : menyeimbangkan produksi dan konsumsi dengan melakukan regenerasi.
- 5) *Innovation and Adaptation* : Inovasi dan adaptasi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum fisika dan adaptasi alami yang berkelanjutan.

prinsip-prinsip pembangunan kelautan perikanan kemudian dihubungkan dengan konsep *blue economy* sehingga dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Terintegrasi : Integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi, kebijakan pusat, daerah dan lintas sektor
- 2) Berbasis kawasan : Manajemen kawasan ekonomi potensial : lintas batas ekosistem, wilayah administratif, dan sektor
- 3) Sistem produksi bersih : Sistem produksi , hemat bahan baku, dan tanpa limbah : bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan

- 4) Investasi kreatif dan inovatif : Penanaman modal dan bisnis dengan model *Blue Economy*
- 5) Berkelanjutan : Keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan

b) Mahzab UNEP

“*Blue Economy means the use of the seas and its resources for sustainable economic development*” (*Blue Economy* adalah konsep/cara pemanfaatan ekosistem laut serta Sumber Daya Alam yang terdapat di dalamnya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan). Pada dasarnya, *Blue Economy* adalah aplikasi *Green Economy* di bidang kelautan (in a *Blue World*) (UNEP, 2012). Padanan istilah *Blue Economy: Blue Green Economy, Blue Growth, The New Maritime Green Economy, Green Economy in a Blue World, or Green Growth in Fisheries and Aquaculture*.

Tabel 2.1 Perbedaan Antara *Red/Brown Economy, Green Economy, Dan Blue Economy*

Parameter	Red/Brown Economy	Green Economy	Blue Economy
Produksi	Tinggi	Optimal	Optimal
Biaya Produksi	Rendah	Tinggi	Rendah
Social Capital	Rendah	Rendah	Tinggi
Limbah	Tinggi	Rendah	Nir limbah
Kerusakan Lingkungan	Tinggi	Rendah	Tanpa merusak Lingkungan
Subsidi	Tinggi	Tinggi	Rendah
Investasi	Tinggi	Tinggi	Rendah

Sumber : Rokhmin Dahuri, 2021

Berdasarkan mazhab di atas, secara keseluruhan *Blue Economy* adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016). *Blue Economy* mencakup semua

kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor- sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor- sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020). Ekonomi biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestration, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010).

Adapun konsep Blue Economy dijabarkan ke dalam beberapa sub sektor ekonomi maritim Indonesia, yaitu :

1) Perikanan

Cluster Perikanan mencakup perikanan laut dan payau baik perikanan tangkap maupun budidaya, dan tidak mencakup perikanan air tawar. Cluster ini juga mencakup perdagangan hasil penangkapan dan budidaya ikan laut. Perikanan laut terdiri dari perikanan pantai dan perikanan laut dalam. Perikanan pantai merupakan bentuk usaha penangkapan ikan yang hanya dilakukan di wilayah pantai dan sekitarnya, dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil dari pantai. Jenis ikan yang diperoleh di wilayah laut dangkal yaitu ikan kembung, teri, petek, lemuru, dan cumi serta ubur-ubur. Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan di laut lepas atau samudra yang biasanya dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan peralatan canggih. Ikan tuna dan cakalang merupakan jenis ikan yang biasanya diperoleh di laut dalam.

Selain ikan, sumber daya hayati laut lain termasuk dalam cluster perikanan, seperti siput, kerang, tiram, sotong, gurita, udang, lobster, bintang laut, teripang, dan rumput laut. Sumber daya hayati tersebut sangat bermanfaat baik untuk bahan pangan, farmasi maupun kosmetik. Selanjutnya, Indonesia juga merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman rumput

laut dengan jumlah spesies yang beragam. Rumput laut dapat digunakan untuk bahan pangan karena mengandung serat, mineral, protein, lipid, vitamin, dan antioksidan. Selain itu rumput laut juga dimanfaatkan dalam bidang industri kerajinan, tekstil, kosmetik, farmasi, dan kertas. Perdagangan yang tercakup dalam Cluster Perikanan yaitu perdagangan hasil penangkapan maupun budidaya, baik untuk perdagangan besar maupun eceran. Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, cluster Perikanan bersumber dari Lapangan Usaha Perikanan dan Lapangan Usaha Perdagangan dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor dalam klasifikasi PDB Indonesia.

2) ESDM

Cakupan cluster Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdiri dari pertambangan di laut dan pesisir, yaitu energy terbarukan yang berasal dari laut dan sumber daya mineral yang berasal dari laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Tetapi cakupan dalam cluster ESDM hanya kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi). Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Sumber daya mineral dapat berupa emas, intan, timah, mangan, nikel, bijih besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas bumi, batu bara, belerang, fosfat, gipsum, yodium, dan kaolin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Namun demikian, seperti pada pertambangan minyak dan gas bumi dimana yang menjadi cakupan dalam pertambangan mineral pun hanya pada tahap eksplorasi dan eksploitasi mineral, atau pada kegiatan usaha hulu saja. Di dalam klasifikasi PDB Maritim, cluster ESDM berasal dari beberapa lapangan usaha yaitu lapangan usaha Pertambangan Migas; Pertambangan Bijih Logam; Pertambangan dan Penggalian Lainnya; dan Industri Pengilangan Migas.

3) Industri Bioteknologi

Cluster Industri Bioteknologi mencakup industri yang bertujuan untuk mencegah punahnya biota laut, menghasilkan produk baru yang mempunyai nilai tambah, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan mengembangkan system pengelolaan sumber daya laut yang berkesinambungan (UU No. 32 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3). Bioteknologi adalah penggunaan komponen makhluk hidup atau sistem biologi untuk membuat suatu produk atau proses. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dilakukan untuk produk-produk fermentasi misalnya tempe, tape, dan yogurt. Bioteknologi modern misalnya pada teknologi DNA rekombinan, untuk pembuatan obat-obatan, cloning domba, dll. Secara garis besar industri bioteknologi kelautan meliputi tiga kelompok industri. Pertama adalah ekstraksi (pengambilan) senyawa aktif (bioactive substances) atau bahan alami (natural products) dari biota laut sebagai bahan dasar (raw materials) untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, perekat, film, kertas, dan berbagai industri lainnya. Kedua, berupa rekayasa genetik (genetic engineering) terhadap spesies tumbuhan atau hewan untuk

menghasilkan jenis tumbuhan atau hewan baru yang memiliki karakteristik genotip maupun fenotip yang jauh lebih baik (unggul) ketimbang spesies yang aslinya. Ketiga adalah dengan merekayasa genetik dari mikroorganisme (bakteri), sehingga mampu melumat (menetralkan) bahan pencemar (pollutants) yang mencemari suatu lingkungan perairan atau daratan (seperti tumpahan minyak/ oil spills), sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih, tidak lagi tercemar. Teknik pembersihan pencemaran lingkungan semacam ini lazim dinamakan sebagai bioremediasi ((Zilinskas & Lundin, 1993), dalam Dahuri, 2012). Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, Cluster Industri Bioteknologi berasal dari beberapa Lapangan Usaha, yaitu Lapangan Usaha Industri Makanan dan Minuman; Lapangan Usaha Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan.

4) Industri Maritim

Industri maritim adalah perindustrian yang bergerak dalam bidang pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung, pembuatan dan perbaikan alat-alat penggerak dan semua perlengkapan kapal serta pembuatan bahan- bahan/barang-barang pembantu-pelengkap untuk melaksanakan pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung serta salvage. Cakupan cluster Industri Maritim dapat berupa: galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal (UU No.32 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4). Galangan kapal merupakan kegiatan pembuatan kapal/alat terapung, perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat terapung termasuk ke dalam Industri maritim. Kegiatan yang termasuk dalam salvage yaitu pengangkatan kerangka-kerangka kapal dan benda-benda lain yang berharga dari dalam lautan; memberi pertolongan untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang mengalami kecelakaan di tengah laut; pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim); membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih

mengapung dan mengalami kecelakaan. Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, cluster Industri Maritim berasal dari Lapangan Usaha Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Konstruksi.

5) Jasa Maritim

Cakupan cluster Jasa maritim antara lain: pendidikan dan pelatihan; pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; pengerukan dan pembersihan alur pelayaran; reklamasi; pencarian dan pertolongan; remediasi lingkungan; jasa konstruksi; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) (UU No. 32 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4). Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jasa konstruksi yang dicakup dalam cluster Jasa Maritim yaitu konstruksi selain bangunan pelabuhan untuk perhubungan (dicakup dalam cluster Perhubungan Laut) dan konstruksi bangunan laut (dicakup dalam cluster Bangunan Laut). Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, cluster Jasa Maritim berasal dari Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan.

6) Parawisata Bahari

Wisata Bahari atau Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai,

sungai, danau, dan waduk (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009). Wisata bahari mencakup wisata yang memiliki objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (seascaped) maupun bentang darat pantai (coastal landscape), mengandung unsur alam dan bukan buatan. Cakupan wisata bahari tidak memasukan penyediaan akomodasi yang mendukungnya. Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, Cluster Wisata Bahari berasal dari Lapangan Usaha Real Estat; Lapangan Usaha Jasa Perusahaan; dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya.

7) Perhubungan Laut

Perhubungan Laut mencakup angkutan laut, jasa penunjang, pelabuhan dan aktivitasnya (UU No.32 Tahun 2014 pasal 29 dan 30). Menurut UU No.17 Tahun 2008 Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, Cluster Perhubungan Laut berasal dari

Lapangan Usaha Konstruksi; Angkutan Laut; dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir.

8) Bangunan Laut

Cakupan cluster Bangunan Laut terdiri bangunan pantai dan bangunan lepas pantai. Bangunan pantai adalah bangunan yang bertujuan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus. Sedangkan bangunan lepas pantai adalah struktur atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang maupun mineral alam. Fungsi utama dari bangunan lepas pantai adalah untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Semua konstruksi di pantai dan laut yang fungsinya bukan seperti disebutkan di atas tidak termasuk Bangunan Laut. Bangunan Laut berdasarkan sistem dan strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu bangunan terpancang, bangunan terikat, dan bangunan terapung. Bangunan laut berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu konstruksi di atas pantai sejajar dengan garis pantai (revetment), konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung pantai (groin, jetty), dan konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar garis pantai (breakwater). Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, cluster Bangunan Laut berasal dari Lapangan Usaha Konstruksi.

9) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut

Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut mencakup Kementerian Pertahanan, TNI, Bakamla (UU No.32 Tahun 2014 Tahun 2014). Ditambahkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (terkait polisi air), dan Kementerian Perhubungan (terkait Komite Nasional

Keselamatan Transportasi). Cakupan wilayah dari Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut adalah perairan, dasar laut, dan sub bawah laut. Di dalam klasifikasi PDB Indonesia, cluster Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut berasal dari Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2.1.3 Ekonomi Pertahanan

Ilmu ekonomi pertahanan menggunakan perangkat ilmu ekonomi untuk mempelajari sektor pertahanan dan implikasinya di dalam dan luar negeri (Intriligator, 1990). Ilmu ekonomi pertahanan didefinisikan sebagai implementasi ilmu ekonomi pada masalah pertahanan Negara yang sama halnya dengan ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, dan ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan adalah ilmu ekonomi yang telah dikerahkan secara mendalam pada suatu bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara (Yusgiantoro, 2014).

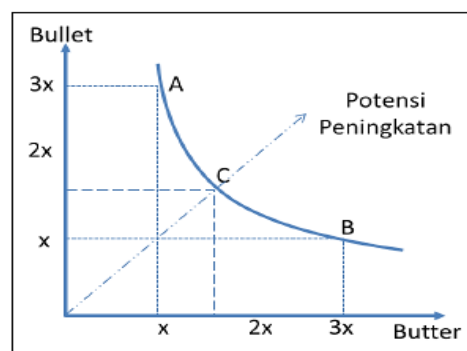
Ekonomi Pertahanan adalah ilmu ekonomi yang mengkaji berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya nasional seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya buatan (SDB), sarana dan prasarana sebagai wujud pertahanan Negara serta Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan Keamanan nasional (Supandi, 2019).

Ekonomi dan pertahanan merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Kita sering mendengar dan membaca frase "*guns versus butter*" atau "*gun versus grain*", untuk menggambarkan hubungan yang saling terkait antara pembangunan ekonomi dan peningkatan pertahanan. Karena kedua aspek ini saling mendukung, maka tidak dapat dikatakan bahwa aspek ekonomi lebih penting daripada aspek defensif, dan sebaliknya aspek defensif lebih dominan daripada aspek ekonomi. Keduanya memiliki peran yang sama dalam membentuk negara berdaulat yang kuat di dunia internasional.

Ekonomi pertahanan berasal dari susunan multi-dimensi masalah yang harus ditangani setiap negara ketika menyediakan keamanan nasionalnya. Menerapkan konsep dan metode ekonomi, kemudian mencoba untuk mengevaluasi pertanyaan terkait keamanan tersebut, dan untuk memahami bagaimana keamanan setiap negara berinteraksi dan cocok dengan keamanan semua negara dalam sistem internasional. Termasuk dalam Ekonomi Pertahanan adalah pertanyaan-pertanyaan menyeluruh seperti: definisi tentang apa sebenarnya keamanan itu; bagaimana kelangkaan sumber daya, distribusi, dan tahap perkembangan ekonomi mempengaruhi keamanan yang dapat diperoleh setiap negara dalam sistem internasional; hubungan antara sektor pertahanan dan ekonomi nasional di dalam dan antar negara; efisiensi dalam penyediaan keamanan; struktur insentif yang mempromosikan atau menyelesaikan konflik (McGuire, 1995) .

Pada dasarnya, mengacu pada filosofi *gun versus butter*, konsep *gun versus butter* dimulai dengan pemahaman bahwa sumber daya terbatas untuk melindungi suatu negara dari ancaman, dan baik untuk membeli peluru atau untuk memenuhi tuntutan rakyat. Awalnya ada sebagai perdebatan yang lebih penting antara membeli mentega. Kebutuhan pangan lebih penting antara pertahanan suatu negara dan pembangunan ekonomi. Perkembangan paradigma tersebut kemudian beralih menjadi analisis yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia akan kebutuhan dasar sehari-hari dan kebutuhan manusia untuk menciptakan rasa aman. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipenuhi secara tak terbatas sesuai keinginan manusia. Karena sumber daya yang terbatas. Ketika kepuasan kebutuhan dasar meningkat, kepuasan kebutuhan keamanan menurun secara langsung. Secara grafis, hubungan antara keduanya dapat diilustrasikan pada gambar di atas. Dengan hanya empat kali total kapasitas anggaran negara, kebutuhan *guns* dan *butter* dapat dipenuhi dalam beberapa kondisi. Jika Anda menghabiskan anggaran di titik A dan membeli 3x *guns*, Anda hanya dapat

membeli 1x *butters*. Pertanyaannya dalam situasi ini, apakah kebutuhan 1x butter sudah bisa memenuhi kebutuhan finansial masyarakat? Jika prioritas diubah ke titik B dan 3x anggaran digunakan untuk membeli butter, kebutuhan gun hanya dapat dipenuhi 1x. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan apakah kebutuhan 1x *gun* dapat mendukung kepentingan pertahanan negara. Kondisi lain dapat menyeimbangkan prioritas seperti pada poin C. Dalam hal ini, *gun* dan *butters* memiliki prioritas yang sama dan seimbang. Namun, opsi ini tidak selalu dapat diterapkan mengingat kedua keputusan tersebut selalu dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis.



Gambar 2.1 Hubungan Guns vs Butter

Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Ishola Williams, bahwa negara, yang juga tersirat sebagai entitas manusia, memiliki dua kebutuhan mendasar yang saling mengikat: kebebasan berkehendak dan kebebasan dari ancaman ketakutan. Kedua kebutuhan ini saling berkaitan dan mempengaruhi kebutuhan manusia yang mutlak. Keamanan manusia menumbuhkan perilaku ekonomi yang positif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakpastian mempengaruhi gradien negatif pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi yang tidak stabil mempengaruhi kelemahan bangsa dalam menyediakan negara dengan sistem pertahanan yang mengesankan. Hubungan ini dapat menjelaskan bagaimana ekonomi dan pertahanan dapat mempengaruhi untuk naik level secara bersamaan dan sebaliknya. Pada akhirnya, kunci potensi perbaikan baik di bidang ekonomi maupun pertahanan terletak pada penggunaan

kontrol strategis yang tepat yang dapat meningkatkan nilai kedua kebutuhan dasar ini. Merujuk pada kemauan politik pemerintah untuk mengembangkan sektor maritim, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola sumber daya maritim sebagai aset pembangunan negara, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.

Gerakan Indonesia untuk merevitalisasi kehidupan maritim, ketertiban melalui manajemen strategis untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang besar, atau visi Poros Maritim Dunia (PMD) oleh pemerintah Indonesia perlu ditingkatkan dengan eksistensi di kawasan Samudera Hindia. Perwujudan dan pemutakhiran visi tersebut memerlukan kerangka kerja yang memperhatikan sifat pembangunan nasional yang heterogen dan dinamis serta dapat menjadi motor penggerak kemajuan di berbagai sektor dan kegiatan maritim Indonesia.

2.1.4 Peramalan

Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan apa yang sudah terjadi di masa lalu (Assauri, 1984). Dalam rangka usaha untuk melihat dan mengkaji situasi dan kondisi di masa depan, harus dilakukan peramalan. Oleh karena itu perlu diperkirakan atau diramalkan situasi apa dan kondisi bagaimana yang akan terjadi pada masa depan.

Menurut John E. Biegel: "Peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang".(Biegel, 1971)

Dalam peramalan (*forecasting*) tidak jarang terjadi kesalahan misalnya saja penjualan sering tidak sama dengan nilai eksak yang diperkirakan. Sedikit variasi dari perkiraan sering dapat diserap oleh kapasitas tambahan, persediaan penjadwalan permintaan. Tetapi, variasi perkiraan yang besar dapat merusak operasi. Ada tiga cara untuk mengakomodasi perkiraan, yaitu: yang pertama adalah mencoba mengurangi kesalahan melakukan perkiraan yang lebih baik. Yang kedua

adalah, membuat fleksibilitas pada operasi dan yang terakhir adalah mengurangi waktu tunggu yang dibutuhkan dalam prakiraan. Tetapi kemungkinan kesalahan terkecil adalah tujuan yang konsisten dengan biaya prakiraan yang masuk akal.

Menurut Buffa: "Peramalan atau *forecasting* diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis". (Buffa & Sarin, 1996)

Menurut Makridakis: "Peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen" (Makridakis & Wheelwright, 1994).

Organisasi selalu menentukan sasaran dan tujuan, berusaha menduga faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Kebutuhan akan peramalan meningkat sejalan dengan usaha manajemen untuk mengurangi ketergantungannya pada hal-hal yang belum pasti. Peramalan menjadi lebih ilmiah sifatnya dalam menghadapi lingkungan manajemen. Karena setiap organisasi berkaitan satu sama lain, baik buruknya ramalan dapat mempengaruhi seluruh bagian organisasi (Wheelwright et al., 1998).

Beberapa bagian organisasi dimana peramalan kini memainkan peranan yang penting antara lain (Wheelwright et al., 1998):

a. Penjadwalan sumber daya yang tersedia

Penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia dan sebagainya.

b. Penyediaan sumber daya tambahan

Waktu tenggang (*lead time*) untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang.

c. Penentuan sumber daya yang diinginkan

Setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang ingin dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan semacam itu bergantung pada

kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk dan teknologis. Semua penentuan ini memerlukan ramalan yang baik dan manajer dapat menafsirkan perkiraan serta membuat keputusan yang tepat.

Walaupun terdapat banyak bidang lain yang memerlukan peramalan namun tiga kelompok di atas merupakan bentuk khas dari keperluan peramalan jangka pendek, menengah dan panjang dari organisasi saat ini. Dengan adanya serangkaian kebutuhan itu, maka perusahaan perlu mengembangkan pendekatan berganda untuk memperkirakan peristiwa yang tidak tentu dan membangun suatu sistem peramalan. Pada gilirannya, organisasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang meliputi paling sedikit empat bidang yaitu identifikasi dan definisi masalah peramalan, aplikasi serangkaian metode peramalan, prosedur pemilihan metode yang tepat untuk situasi tertentu dan dukungan organisasi untuk menerapkan dan menggunakan metode peramalan secara formal. Tiga kegunaan peramalan antara lain adalah:

- 1) Menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik.
- 2) Menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada.
- 3) Menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada.

Situasi peramalan sangat beragam dalam *horizon* waktu peramalan, faktor yang menentukan hasil sebenarnya, tipe pola dan berbagai aspek lainnya. Untuk menghadapi penggunaan yang luas seperti itu, beberapa teknik telah dikembangkan. Peramalan pada umumnya dapat dibedakan dari berbagai segi tergantung dalam cara melihatnya. Dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari satu

setengah tahun atau tiga semester. Lebih tegasnya peramalan jangka panjang ini berorientasi pada dasar atau perencanaan.

- b. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang dilakukan kurang dari satu setengah tahun atau tiga semester.

Berdasarkan sifat ramalan, peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif (Assauri, 1984). Peramalan kualitatif atau teknologis, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu. Hasil peramalan yang ada tergantung pada orang yang menyusunnya, karena peramalan tersebut sangat ditentukan oleh pemikiran yang bersifat intuisi, *judgement* (pendapat) dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Metoda kualitatif dibagi menjadi dua metode, yaitu:

- a. Metode eksploratif

Pada metoda ini dimulai dengan masa lalu dan masa kini sebagai awal dan bergerak ke arah masa depan secara heuristik, sering kali dengan melihat semua kemungkinan yang ada.

- b. Metode normatif

Pada metode ini dimulai dengan menetapkan sasaran tujuan yang akan datang, kemudian bekerja mundur untuk melihat apakah hal ini dapat dicapai berdasarkan kendala, sumber daya dan teknologi yang tersedia.

Sedangkan Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat tergantung pada metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang mungkin. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat tiga kondisi berikut (Makridakis, 1993):

- a) Tersedia informasi tentang masa lalu.
- b) Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik.

- c) Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang (asumsi berkesinambungan / *assumption of continuity*).

Metode peramalan kuantitatif terbagi atas dua jenis model peramalan yang utama, yaitu:

1. Model deret berkala (*time series*), yaitu Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan deret waktu.
2. Model kausal, yaitu metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel lain yang mempengaruhinya, yang bukan waktu yang disebut metode korelasi atau sebab akibat.

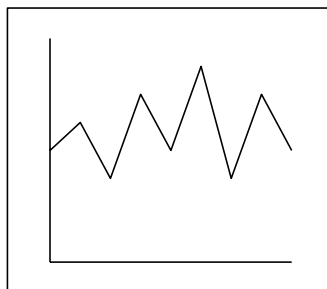
Model kausal terdiri dari:

- a. Metode regresi dan korelasi
- b. Metode ekonometri
- c. Metode input dan output

Langkah penting dalam memilih suatu metode deret berkala (*time series*) yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu (Wheelwright et al., 1998):

1. Pola Horizontal (H) atau *Horizontal Data Pattern*

Pola data ini terjadi bilamana data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat

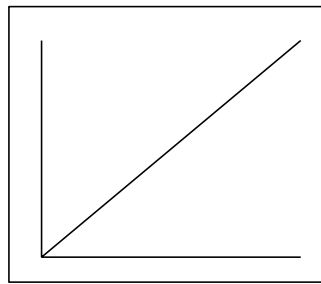


atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Bentuk pola horizontal ditunjukkan seperti gambar berikut :

Gambar 2.2. Pola Data Horizontal

2. Pola *Trend* (T) atau *Trend Data Pattern*

Pola data ini terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contohnya penjualan perusahaan, produk bruto nasional (GNP) dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya, selama perubahan sepanjang waktu. Bentuk pola *trend* ditunjukkan seperti gambar berikut

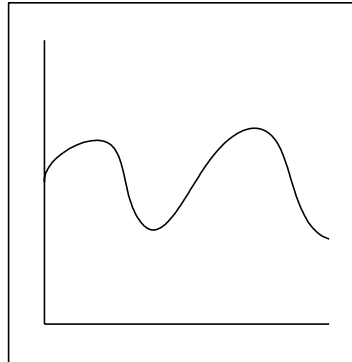


Gambar 2.3. Pola Data *Trend*

3. Pola Musiman (S) atau *Seasonal Data Pattern*

Pola data ini terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman atau apabila nilai pengamatan dari data mengalami perubahan dalam jangka waktu yang pendek. (misalnya kuartal tahun tertentu, bulan atau hari-hari pada minggu tertentu). Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim dan bahan bakar

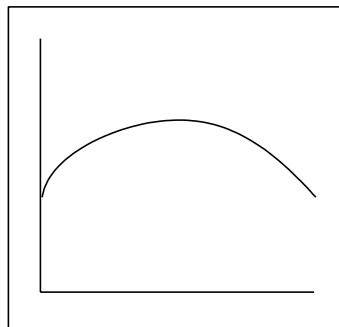
pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. Bentuk pola *trend* ditunjukkan seperti gambar berikut.



Gambar 2.4. Pola Data Musiman

4. Pola Siklis (S) atau Cycled Data Pattern

Pola data ini terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi/ perubahan ekonomi dalam jangka waktu panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya penjualan produk seperti mobil, baja. Bentuk pola siklis ditunjukkan seperti gambar berikut.



Gambar 2.5. Pola Data Siklis

Secara garis besar metode time series dapat dikelompokkan menjadi:

a) Metode *Averaging*

Dipakai untuk kondisi dimana setiap data pada waktu yang berbeda mempunyai bobot yang sama sehingga fluktuasi random data dapat direndam dengan rata-ratanya, biasanya dipakai untuk peramalan jangka pendek. Adapun metode-metode yang termasuk didalamnya,

antara lain: *Simple Average*, *Single Moving Average*, dan *Double Moving Average*.

b) Metode *Smoothing* (Pemulusan)

Dipakai pada kondisi dimana bobot data pada periode yang satu berbeda dengan data pada periode sebelumnya dan membentuk fungsi *Exponential* yang biasa disebut *Exponential smoothing*. Adapun metode-metode yang termasuk didalamnya, antara lain: *Single Exponential Smoothing*, *Double Exponential Smoothing* satu parameter dari Browns, *Double Exponential Smoothing* Dua Parameter dari Holt, hingga Regresi Linier.

Berdasarkan penjabaran tentang Teori Peramalan (*Forecasting*) maka dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan *Forecasting Blue Economy* melalui 7 subsektor dalam bentuk Peramalan kauntitatif Dalam Meningkatkan *Gross National Income*, Mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Memperkuat Pertahanan Negara.

2.1.5 Poros Maritim Dunia

Secara filosofis, Poros Maritim Dunia (PMD) diartikan sebagai reorientasi paradigma (*platform*) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (*land-based development*) menjadi berbasis kelautan (*marine based development*). Kemudian secara Praktis, Poros Maritim Dunia (PMD) bermakna menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim yang maju, adilmakmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritime serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (*ocean governance*).

Poros Maritim Dunia (PMD) diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur pada 13 November 2014 yang diselenggarakan di Naypyidaw, Myanmar. Jepang dan India menjadi Negara yang terlebih dahulu mencanangkan konsep *Confluence of the Two Seas* pada tahun

2007, yang kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat melalui *Rebalancing toward Asia* pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013 (Yani & Montratama, 2018). Dalam istilah Inggris, Poros Maritim Dunia dikenal dengan *Global Maritime Nexus* (GMN). Presiden Jokowi menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yang menjadi focus pengembangan sektor kelautan Indonesia pada abad ke-21, yaitu:

- a. Budaya maritim: Merekonstruksi budaya maritim Indonesia dengan mendefinisikan kembali identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim.
- b. Ekonomi maritim: Secara bersama-sama melakukan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam kelautan negara.
- c. Konektivitas maritim: Mengutamakan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, serta pariwisata bahari..
- d. Diplomasi maritim: Mengoptimalkan soft power dalam menghadapi ancaman regional dan meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritim.
- e. Keamanan maritim: Mempersiapkan kekuatan keras untuk memperkuat pertahanan angkatan laut Indonesia untuk mengamankan wilayah Indonesia.

Pada tanggal 22 Agustus 2007, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan pidato di depan Parlemen India berjudul "The Confluence of the Two Seas", di mana ia memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah Indo-Pasifik, yang meliputi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian Barat dan Tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudera tersebut (Medcalf, 2013). Kemudian, pada November 2011, sebagai tanggapan atas kebangkitan China sebagai kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik, Presiden Barack Obama menetapkan kebijakan afiliasi atau reintegrasi Asia-Pasifik (Manyin et al., 2012). Implementasi kebijakan tersebut memprioritaskan kawasan Asia-Pasifik dalam

perencanaan militer, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi AS. Penataan kembali dilakukan melalui penarikan pasukan AS dari Irak dan Afghanistan dan fokus perkembangan di kawasan Asia-Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. ada 3 (tiga) kajian Poros Maritim Dunia (PMD) yang relevan dari penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) Poros Maritim Dunia (PMD) diartikan sebagai cita-cita dan konsekuensi bahwa Indonesia harus terlebih dahulu berbenah menjadi Poros dunia agar mampu mengatur permukaan laut global. Sebelum Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menjadi poros di tingkat regional dan naik ke tingkat internasional. (Herindrasti, 2014).
- 2) Pertahanan maritim Indonesia akan semakin kuat, sesuai dengan pembangunan ekonomi Indonesia yang maksimal. Kekuatan Pertahanan maritime Indonesia akan berimplikasi pada peningkatan keamanan laut di perairan Indonesia (Pertiwi, 2014)
- 3) Poros Maritim Dunia (PMD) adalah kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis maritim secara berkelanjutan (*blue economy*) (Manurung, 2014)

Menurut Grygiel, geopolitik mendeskripsikan distribusi geografis pusat sumber daya dan rute transportasi pelayaran. Hal peting lainnya tentang Poros Maritim Dunia (PMD), posisi geografis Indonesia tepat di tengah-tengah Indo-Pasifik, dapat dilihat sebagai respon Indonesia terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik. (Grygiel, 2006).

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu atau *literature review* merupakan uraian tentang berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik/permasalahan penelitian Geopolitik dan Geostrategi *Forecasting/* Peramalan *Blue Economy* Dalam Meningkatkan *Gross National Income* dan Memperkuat Pertahanan Negara Mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan/ Relevansi
1.	Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Suatu Tinjauan Geopolitik (Yani & Montratama , 2018)	Kualitatif	Poros Maritim Dunia bukanlah dogma atau geopolitik tunggal untuk arah pembangunan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memiliki dimensi geopolitik lain seperti dimensi darat, udara dan luar angkasa. Pembangunan Poros Maritim Dunia adalah sebuah kebijakan besar yang perlu dukungan semua elemen bangsa, sehingga perlu turunan geopolitik yang lebih operasional di satuan-satuan pelaksana pemerintah.	Dalam penelitian ini, Poros Maritim Dunia ditempatkan sebagai geopolitik, yaitu suatu direksi geografi dari kebijakan luar negeri suatu negara yang menempatkan laut sebagai dimensi pentingnya. Sedangkan dalam tesis ini Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan tujuan atau <i>goal</i> yang ingin dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip Blue Economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan National Income serta untuk kepentingan pertahanan negara Melalui <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> .	Poros Maritim Dunia dijadikan Konsep dalam upaya meningkatkan pertahanan di sektor maritim di tengah dinamika geopolitik kawasan serta kebijakan strategis pemerintah dalam memajukan ekonomi berbasis maritim (<i>blue economy</i>).
2.	The Future of Blue Economy : Lessons for European Union	Kualitatif	Memperkenalkan Keberlanjutan dan Lingkungan Pengalaman mempromosikan ekonomi yang bersahabat Keuntungan dari kegiatan terkait lahan (pertumbuhan biru di banyak negara Eropa. Negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Norwegia	Dalam penelitian ini, Konsep Blue Economy dijadikan oleh Polandia sebagai komersialiasi pembangunan laut secara berkelanjutan. Masa depan Keamanan ekonomi Polandia menjadi penting di lautan dunia dan keanggotaannya yang sukses	Strategi Polandia dalam pengembangan laut secara berkelanjutan dan upaya mewujudkan masa depan kemandirian ekonomi Polandia melalui <i>Blue Economy</i> menjadi pelajaran dalam mengadopsi

	(Kaczynski, 2011)		mengembangkan potensi kelautan mereka untuk mengamankan pasokan sumber daya energi, mineral laut, protein ikan, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pengiriman dan kemampuan penelitian ilmiah.	di badan-badan internasional seperti Uni Eropa, NATO dan berbagai organisasi maritim PBB. Faktor-faktor ini juga akan menentukan posisi Polandia dan perannya dalam ekonomi laut dalam skala global. Sedangkan dalam tesis ini prinsip-prinsip Blue Economy dijadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan melakukan kajian Melalui <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia.	pengembangan Blue Economy Indonesia dalam Penelitian ini.
3.	Toward a Blue Economy : A Pathway for Bangladesh 's Sustainable Growth (Patil et al., 2018)	Kualitatif	"Ekonomi biru" berusaha menyeimbangkan peluang ekonomi dengan kendala lingkungan dalam memanfaatkan laut untuk menciptakan kekayaan. Meskipun banyak diskusi sejak 2012, hanya ada sedikit dokumentasi yang menjelaskan bagaimana negara-negara mengubah ekonomi laut mereka menjadi ekonomi biru. Laporan ini mengisi kesenjangan ini dengan menggambarkan kegiatan ekonomi dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk memandu pembuat kebijakan di Bangladesh dalam	Dalam penelitian ini berisi penjabaran teori dan praktik dari konsep blue economy untuk mengatur kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut, dan untuk menyediakan kerangka kerja bagi Pemerintah Bangladesh dalam menganalisis potensinya. Sedangkan dalam tesis ini prinsip-prinsip Blue Economy dijadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan melihat aspek Melalui <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam	Teori dan Praktik konsep blue economy yang diterapkan Bangladesh dan menjadikannya sebagai kerangka kerja bagi Pemerintah Bangladesh dalam menganalisis potensi maritimnya menjadi referensi bagi Indonesia dalam upaya Pengambilan keputusan untuk Pengembangan Blue Economy sebagai target realistis untuk jalur pembangunan sektor maritime dengan melihat aspek Melalui <i>forecasting</i> (peramalan)

			<p>mengusulkan reformasi konkret. Potensi modal alam serta jenis modal lainnya. Kerangka tersebut mengusulkan titik masuk untuk reformasi kebijakan untuk mengubah aliran input ekosistem laut ke ekonomi kelautan dan sebaliknya dari waktu ke waktu untuk mengurangi output kegiatan ekonomi (seperti polusi) yang dapat mempengaruhi fungsi ekosistem laut. Laporan ini juga menyatukan prinsip-prinsip yang membantu memandu reformasi kebijakan ini.</p>	<p>Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Sehingga Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan teknik analisis.</p>	<p>masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia.</p>
4.	<p>Oceans economy, blue economy, and security: notes on the South African potential and developments</p> <p>(Potgieter, 2018)</p>	Kualitatif	<p>Wacana dan praktik ekonomi biru telah memupuk dan memunculkan cita-cita "pertumbuhan biru" yang menstabilkan dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sebagai sarana untuk mengamankan manfaat sosial dan lingkungan - skenario win-win. Disajikan secara teknis atau hanya mengabaikan kompleksitas sosial lautan, narasi ekonomi biru yang muncul menyoroti praktik ekonomi yang mengatur akses dan kontrol wilayah pesisir dan ruang laut. Bahkan, agenda ekonomi biru telah muncul secara diskursif dan material sebagai modal bisnis dan alam yang baik karena mereka Cita-cita pertumbuhan yang lebih luas dan selengkap di sepanjang pantai dan laut.</p>	<p>Dalam penelitian ini berisi penjabaran tentang pemerintah Afrika Selatan berusaha untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan di sektor maritim yang merupakan bagian dari <i>Operasi Phakisa</i>, yaitu sebuah elemen inheren dari Rencana Sembilan Poin yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Fokus kuat Operasi Phakisa pada masalah ekonomi maritim mengabaikan dua masalah yang belum terselesaikan sehubungan dengan ekonomi maritim dan diplomasi maritim Afrika Selatan, yaitu klaim</p>	<p>Pertumbuhan dan perkembangan di sektor maritim adalah bagian dari <i>Operasi Phakisa yang</i> dilakukan Pemerintah Afrika dengan Penekanan pada keadaan ekonomi lautan saat ini, inisiatif sektor publik dan swasta, keamanan maritim, perawatan lingkungan, tata kelola maritim, serta asumsi tentang potensi pertumbuhan dan prospek masa depan memiliki relevansi dengan penelitian pada tesis ini yang berfokus dengan melihat aspek Melalui <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross</p>

			Di tingkat regional dan nasional, koalisi lembaga multilateral dan nasional secara aktif menggunakan laut sebagai bisnis yang baik, menyatukan pemain sektor publik dan swasta untuk mendorong ekonomi dan wilayah pesisir baru. Mengingat ketidaksetaraan yang sudah berlangsung lama, tidak jelas siapa yang akan menjamin perlindungan lingkungan dan sosial.	perluasan landas kontinen negara tersebut. Sedangkan dalam tesis ini prinsip-prinsip Blue Economy dijadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan melihat aspek Melalui <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Sehingga Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan jenis peneltiian.	National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia.
5.	Blue economy discourses and practices: reconfiguring ocean spaces in the Philippines (Satizábal et al., 2020)	Kualitatif	Laut dipandang sebagai perbatasan terbuka yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan konservasi dan ekonomi. Proses teritorialisasi baru menciptakan perbatasan baru dan struktur pengelolaan, seringkali mengabaikan perlindungan sosial dan lingkungan, yang menimbulkan ancaman signifikan bagi penduduk pesisir. Kami menyimpulkan bahwa dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan pengelolaan pesisir, pendekatan tata kelola yang lebih adil secara sosial dan ramah lingkungan diabaikan.	Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan jenis penelitian. Penelitian tersebut berlocus di Filipina dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pada Tesis ini Locus Penelitian nya adalah Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian Mixed Method dengan melihat aspek <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia..	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah wacana dan praktik Blue Economy di Filipina menjadi pembanding untuk menganalisis pelaksanaan <i>Blue Economy</i> di Indonesia.

6	Blue Economy in the Indian Ocean: Governance Perspectives for Sustainable Development in the Region (Roy, 2019)	Kualitatif	Mencapai tujuan ekonomi biru membutuhkan kolaborasi ekstensif antara masyarakat di negara pesisir dan berbagai pemangku kepentingan lainnya termasuk sektor swasta, LSM, ilmu pengetahuan, dan masyarakat lokal. Akan sangat berharga untuk menarik pelajaran, mekanisme kepatuhan, dan model legislatif dari badan-badan regional lainnya seperti komunitas Pasifik dan Karibia. Menyesuaikan praktik-praktik terbaik dengan konteks Samudra Hindia akan mengisi kesenjangan dalam fondasi kuat regionalisme saat ini di mana pendekatan baru untuk perikanan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan dapat dikembangkan.	Perbedaan nya terletak pada Fokus Penelitian. Yaitu Fokus Penelitian tentang Blue Economy diarahkan lebih kepada analisis perspektif Pemerintahan, sedangkan pada Tesis ini Fokus Penelitian tentang Blue Economy diarahkan pada konsep <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia, serta Geostrategi yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut.	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah wacana dan implementasi Blue Economy memerlukan peran aktif stakeholder terkait serta masyarakat dengan dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang konsep Pembangunan Blue Economy sekitar pesisir. Hal tersebut juga berimplikasi dalam mengatasi kesenjangan maupun potensi ancaman di sector maritime.
7.	Review on opportunities, constraints and challenges of blue economy development in Bangladesh	Kualitatif	Kegiatan ekonomi terkait ekonomi biru dapat menciptakan lapangan kerja dan manfaat nyata yang signifikan, sehingga mengubah kondisi ekonomi dan mata pencaharian jutaan orang yang tinggal di sepanjang pantai. Namun, ini hanya dapat dicapai jika strategi pemerintah selaras dengan tujuan ekonomi biru United Nations Environment Programme (UNEP), sekaligus mendukung tujuan biru untuk melindungi kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi Bangladesh di panggung internasional.	Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan jenis penelitian. Yaitu di Bangladesh dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pada Tesis ini Locus Penelitian nya adalah Indonesia dengan jenis penelitian Mixed Method. Pada Tesis ini akan melihat aspek <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara,	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah wacana dan praktik Blue Economy di Bangladesh menjadi pedoman untuk menganalisis pelaksanaan Blue Economy di Indonesia.

	(Gulam Hussain et al., 2017)		Koordinasi lintas-departemen/lintas-departemen industri-universitas-penelitian, publik-swasta, tanggung jawab sumber daya, waktu dan ruang, dll. sangat penting untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi biru di Bangladesh.	dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia serta Geostrategi yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut.	
8	Towards an Integrated 'Blue Economy' Framework in the Bay of Bengal (Singh, 2020)	Kualitatif	Pemerintah di wilayah Teluk Benggala harus melampaui retorika dalam mempromosikan pertumbuhan biru. Pemangku kepentingan, terutama perusahaan swasta, harus didorong untuk terlibat dalam pertumbuhan biru sejak dini, mengumpulkan sumber daya dan bekerja secara konstruktif dengan para ilmuwan, pemerintah, dan kelompok advokasi untuk memecahkan masalah dan meminimalkan risiko. Negara harus bersedia mendukung berbagai proyek dari pengusaha dan investor, bahkan jika mereka harus menanggung kerugian awal. Melalui upaya holistik, lintas sektoral, upaya BE di Bay Area dapat menjadi hemat biaya, lebih terjangkau, dan bahkan menguntungkan dalam jangka panjang. Harus ada pengakuan umum bahwa "revolusi ekonomi biru" adalah ide yang waktunya telah tiba.	Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan jenis penelitian. Yaitu di Bay of Bengal atau disebut daerah Teluk Benggala, sedangkan pada Tesis ini Locus Penelitian nya adalah Indonesia dengan jenis penelitian Mixed Method. Pada kajian Tesis ini akan melihat aspek <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia serta Geostrategi yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut.	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah wacana dan praktik Blue Economy di Bay of Bengal atau disebut daerah Teluk Benggala menjadi pedoman untuk menganalisis pelaksanaan <i>Blue Economy</i> di Indonesia.

9	From circular economy to blue economy (Iustin-Emanuel et al., 2014)	Kualitatif	Berawal dari prinsip-prinsip ekonomi yang ditopang oleh paradigma hidup holistik, makalah ini berargumen untuk pengembangan kebijakan kewirausahaan terkait ekonomi biru di setiap ekonomi. Ekonomi biru, pada gilirannya, didasarkan pada analisis ilmiah yang menentukan solusi terbaik untuk bisnis. Oleh karena itu, pembentukan modal sosial akan mengarah pada produk yang lebih sehat dan lebih murah, yang akan merangsang kewirausahaan. Ekonomi biru adalah cara berpikir lain dalam praktik ekonomi dan model desain bisnis baru. Ini adalah bisnis yang sehat dan berkelanjutan yang dirancang untuk orang-orang. Faktanya, ini adalah inti dari seluruh paradigma kehidupan di mana ekonomi sirkular akan menjadi lebih maju di masa yang akan datang	Perbedaan nya terletak pada Fokus Penelitian. Yaitu Fokus Penelitian tentang Blue Economy diarahkan pada konsep Bisnis dalam menciptakan produk usaha/ Wirausaha, sedangkan pada Tesis ini akan mengkaji dan melihat aspek <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia serta Geostrategi yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut.	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah wacana dan praktik <i>Blue Economy</i> menjadi konsep dalam pengembangan strategi kebijakan meningkatkan pendapatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
---	--	------------	--	---	---

10	Seychelles Blue Economy Strategy (Purvis, 2015)	Kualitatif	konsep <i>Blue Economy</i> Seychelles bertujuan untuk mengubah pembangunan ekonomi dan Manfaatkan umat manusia dengan bijak menggunakan sumber daya yang ada di laut. ini berarti Salah satu sumber daya global terpenting di dunia perlu dikelola dengan bijak dan hati-hati.	Perbedaan nya terletak pada Locus Penelitian dan jenis penelitian. Yaitu di Seychelles dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pada Tesis ini Locus Penelitian nya adalah Indonesia dan menggunakan jenis penelitian Mixed Method. Pada Tesis ini akan menganalisis aspek <i>forecasting</i> (peramalan) masa depan <i>Blue Economy</i> dalam Meningkatkan Gross National Income, Memperkuat Pertahanan Negara, dan Mewujudkan Poros Maritim Dunia serta Geostrategi yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut	Keterkaitan/ persamaan penelitian tersebut dengan Tesis ini adalah praktik implementasi <i>Blue Economy</i> Seychelles untuk menganalisis pelaksanaan <i>Blue Economy</i> di Indonesia.
----	--	------------	--	---	---

Sumber : diolah oleh peneliti :2022

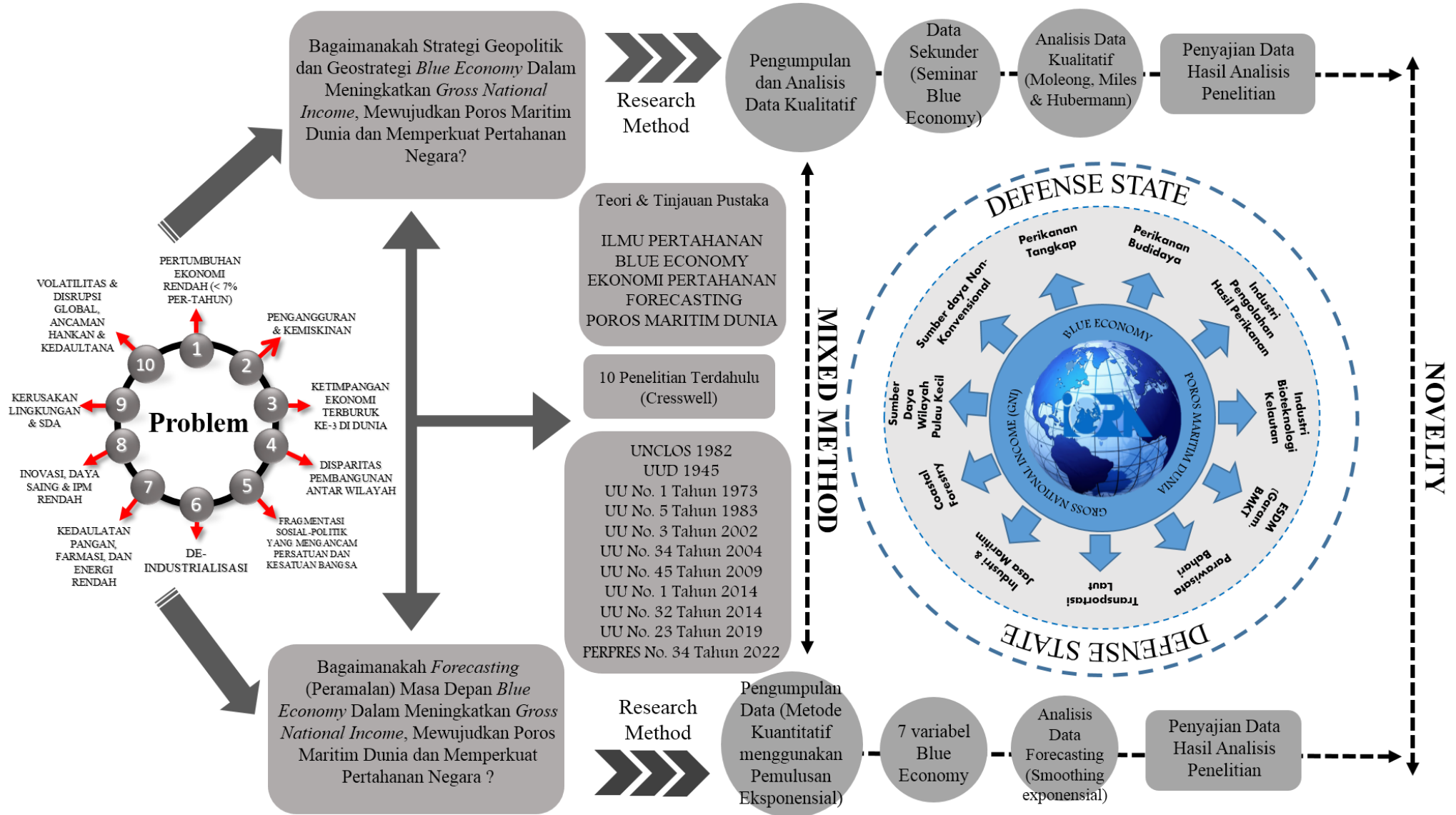
2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai struktur yang menguraikan alur pikir dari sebuah studi penelitian. Struktur dalam kerangka pemikiran didasarkan pada pertanyaan penelitian dan menyajikan sejumlah konsep yang berbeda dan hubungan antara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Kerangka berpikir juga didefinisikan sebagai metode konseptual tentang analisis teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diteliti sebagai objek permasalahan (Dr, 2008).

Bila dianalisis berdasarkan pendapat Polancik dan Sugiyono, Kerangka penelitian diartikan sebagai penjabaran atau pernyataan (proposisi) tentang alur penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan. Secara umum, susunan kerangka pemikiran tersusun melalui alur logis dari pemikiran seorang peneliti, atau seperangkat pertimbangan dalam suatu kerangka penelitian, yang dimulai dengan munculnya suatu masalah dan mencakup berbagai aspek/ teori yang terkait dengan masalah tersebut. Meliputi faktor, proses analisis, dan penghentian. Dengan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, suatu fenomena, gejala, atau permasalahan melalui proses pengamatan oleh peneliti secara langsung yang kemudian akan membentuk sebuah kerangka pemikiran. (Universitas Pertahanan RI, 2021, pp.95).

Adapun Kerangka Pemikiran dengan judul Geopolitik dan Geostrategi *Forecasting/* Peramalan *Blue Economy* Dalam Meningkatkan *Gross National Income* dan Memperkuat Pertahanan Negara Mewujudkan Poros Maritim Dunia sebagai berikut :



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran